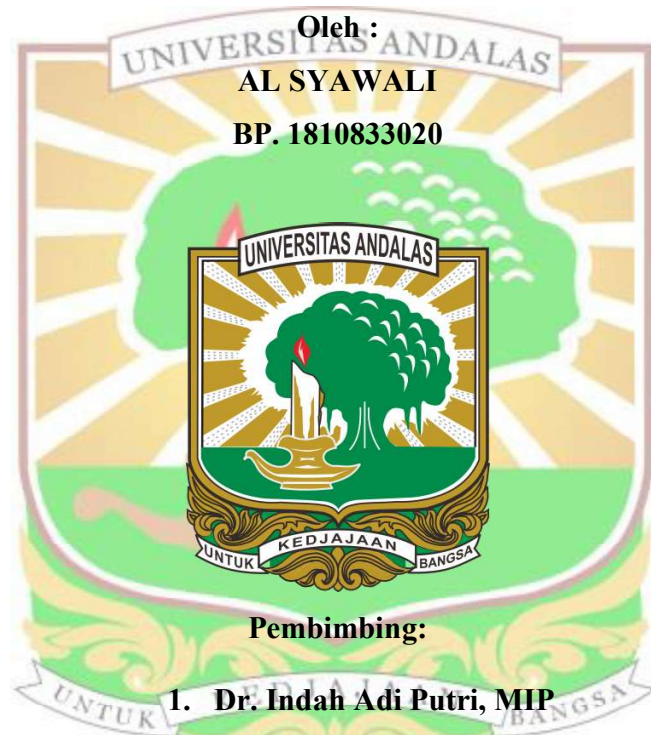


**KORUPSI POLITIK DALAM PEMBEBASAN LAHAN JALAN  
TOL PADANG-PEKANBARU TRASE I KM 22-24**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Percepatan pembangunan bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai sektor baik Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pembangunan jalan bebas hambatan atau yang lebih dikenal sebagai jalan Tol untuk memperlancar mobilitas masyarakat dalam berbagai sektor kepentingan. Jalan tol Padang-Pekanbaru adalah bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang masuk dalam proyek straregis Nasional era pemerintahan presiden Joko Widodo. Akan tetapi dalam pembangunannya terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kronologis terjadinya dugaan korupsi di Nagari Parit Malintang dan faktor-faktor terjadinya dugaan korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Korupsi Robert Klitgard, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Kronologis dugaan korupsi muncul setelah adanya proses ganti rugi lahan yang berada di taman Keanekaragaman Hayati, sehingga para penerima ganti rugi diduga melakukan korupsi senilai 29M, namun dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang dugaan tidak terbukti dan para tersangka dibebaskan. Faktor-faktor penyebab dugaan korupsi adalah Proses ganti rugi lahan IKK belum selesai, Alih fungsi lahan taman Kehati dan Status Ganda kepemilikan tanah di area kantor Bupati Padang Pariaman. Masyarakat Parit Malintang tidak terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Padang, Hakim pengadilan Negeri Padang membebaskan atas dakwaan tersangka, namun Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Maka hingga Juni 2023 kasusnya masih berlanjut di Mahkamah Agung.

**Kata Kunci : Korupsi, Kekuasaan, Pembangunan**



## ABSTRACT

Acceleration of development aims to facilitate the community access various sectors both Economy, Health, Education and many else. Likewise with the construction of freeways or better known as toll roads to facilitate peoples mobility in various sectors of interest. The Padang-Pekanbary toll road is part of The Trans Sumatera Toll road which was included in the national strategic project during the administration of President Joko Widodo. However during its construction, there were allegations of corruption committed by several parties in Parit Malintang, Enam Lingkung District, Padang Pariaman Regency. Theory in this study is Used Robert Klitgard Theory of corruption. The purpose of this study is to explain the chronology of alleged corruption in Parit Malintang and the factors that led to alleged corruption. The method used in this research is qualitative with case studies. The chronology of the alleged corruption emerged after the corruption process for land located in the Biodiversity Park, so that the recipients of compensation were suspected of committing corruption worth 29 billion rupiah, but in the Padang district court trial the allegations were not proven and the suspects were acquitted. The Factors causing the alleged corruption are the process of Kehati park land function and the dual status of land ownership in the Padang Pariaman Regent's office area. The Parit Malintang community was not proven guilty at the Padang District Court, the Padang district court judge acquitted the suspect's indictment, but the West Sumatera High Prosecutor's office filed an appeal to the Mahkamah Agung, Until June 2023 the case is still continuing at the Mahkamah Agung..

Keywords : Corruption, Power, Development

